KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kinerja Legislasi 2022 Naik, DPR Minta Publik Terus Awasi
Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 5

Kinerja Legislasi 2022 Naik, DPR Minta Publik Terus Awasi

JELANG penutupan 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah merampungkan sejumlah rancangan undang-undang yang disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan produk legislasi itu berasal dari komisi, panitia khusus (pansus), Badan Legislasi (Baleg), dan Badan Anggaran (Banggar).

Indra memaparkan DPR menyelesaikan lebih dulu Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara (IKN) oleh pansus pada 18 Januari. Kinerja legislasi terus dipacu hingga yang teranyar disahkan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan data Sekretariat DPR, RUU yang disahkan menjadi UU adalah 13 UU tahun 2020, 13 UU 2021 dan 32 UU tahun 2022. "Jumlah itu sangat signifikan karena memang DPR mengutamakan kualitas, bukan kuantitas yang tentu saja pembahasannya harus cermat dan terperinci," imbuh Indra, kemarin.


DOK DPR RI

Ia mengatakan sebagai wakil rakyat, DPR tidak bisa dilepaskan dari tugas dan wewenang yang meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. "Publik bisa mengawal atau mengawasi fungsi-fungsi ini. Fungsi legislasi yang biasanya banyak dikawal oleh publik mulai usulan, pembahasannya, hingga pengesahannya," terang Indra.

Indra juga menyampaikan sepanjang 2022 Sekretariat Jenderal DPR telah menerima 16 penghargaan, di antaranya mendapat sertifikat indeks keamanan informasi dan sertifikat pencapaian tingkat maturitas keamanan siber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kemudian penghargaan sebagai anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) terbaik II di tingkat lembaga negara dari Kementerian Hukum dan HAM. Ada pula anugerah meritokrasi dengan predikat sangat memuaskan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, penghargaan kontribusi pemenuhan kewajiban pajak 2021, dan akreditasi A dari Perpustakaan Nasional.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan dalam pembentukan undang-undang, DPR bersama pemerintah terus berupaya bekerja dengan cermat dan mempertimbangkan berbagai pendapat serta membuka ruang partisipasi rakyat untuk menyampaikan aspirasi.

Di tahun ini, DPR RI juga sukses menggelar pertemuan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali, pada Maret. Sebanyak 115 Parlemen luar negeri hadir dan berkomitmen dalam Deklarasi Nusa Dua. Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan IPU ke-144 berkali-kali disampaikan oleh Presiden IPU Duarte Pacheco.

Kemudian, pada Oktober 2022, berlanjut dengan suksesnya gelaran pertemuan P-20. Forum tersebut dihadiri *parliament speakers* atau pimpinan parlemen dari negara G-20, yang diselenggarakan di Gedung DPR RI, Jakarta. (Sru/P-25)

Kinerja Fungsi Legislasi DPR

(Tahun Sidang 2021-2022)

Prolegnas Prioritas: 40 RUU

- 26 RUU diusulkan DPR.
- 12 RUU diusulkan pemerintah.
- 2 RUU diusulkan DPD.

Tahap Penyusunan di DPR

- Penyusunan oleh anggota dan alat kelengkapan DPR: **9 RUU**
- Proses harmonisasi di badan legislasi: **9 RUU**
- Akan memasuki Tahap Pembicaraan Tingkat I: **6 RUU**
- Jumlah: **24 RUU**

Tahap Pembicaraan Tingkat I

- **9 RUU**

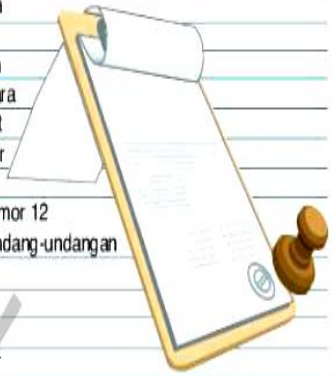
Jumlah RUU yang Dibahas dan Disetujui Menjadi UU

(2020-2022)

	2020	2021	2022
DPR	2	5	25
Pemerintah	11	8	6
DPD	-	-	1
Jumlah	**13**	**13**	**32**

Sejumlah RUU yang Diselesaikan pada 2022

- **18 Januari:** UU tentang Ibu Kota Negara
- **15 Februari:** UU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
- **15 Februari:** UU tentang Provinsi Sulawesi Selatan
- **15 Februari:** UU tentang Provinsi Sulawesi Utara
- **15 Februari:** UU tentang Provinsi Sulawesi Tengah
- **15 Februari:** UU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara
- **15 Februari:** UU tentang Provinsi Kalimantan Barat
- **15 Februari:** UU tentang Provinsi Kalimantan Timur
- **12 April:** UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- **24 Mei:** UU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- **30 Juni:** UU tentang Provinsi Riau
- **30 Juni:** UU tentang Provinsi Jambi
- **30 Juni:** UU tentang Provinsi Sumatra Barat
- **30 Juni:** UU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur
- **30 Juni:** UU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat
- **30 Juni:** UU tentang Provinsi Papua Selatan
- **30 Juni:** UU tentang Provinsi Papua Tengah
- **30 Juni:** UU tentang Provinsi Papua Pegunungan Tengah
- **7 Juli:** UU tentang Praktik Psikologi (UU tentang Pendidikan dan Layangan Psikologi)
- **7 Juli:** UU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- **30 Agustus:** UU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional
- **30 Agustus:** UU tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea
- **6 September:** UU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021
- **20 September:** UU tentang Pelindungan Data Pribadi
- **29 September:** UU tentang APBN Tahun Anggaran 2023
- **17 November:** UU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
- **6 Desember:** UU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- **6 Desember:** UU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang kerja Sama Pertahanan
- **6 Desember:** UU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan



Sumber: Baleg DPR RI/Litbang MI